



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merpati, Remu, Sorong, Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat Daya

Sorong, 30 September 2026

Nomor : 000.910/183/UND-PBD/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Undangan Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Di-

Tempat

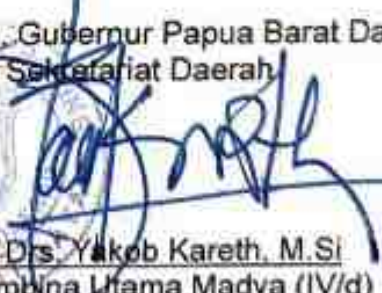
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Oktober 2026

Waktu : 08.00 - selesai

Tempat : Royal Mamberamo Hotel, Kota Sorong

Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

An. Gubernur Papua Barat Daya
Pj. Sekretariat Daerah

Dr. Drs. Yakob Kareth, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19670804 198810 1001

Lampiran Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya

Nomor : 000.9.10/ 283 /UND-PBD/2026

Hal : Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program ATM melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota

1. Peserta Provinsi PBD: (2 orang)

No	Instansi	Jabatan	Jumlah Peserta
1	Dinas Kesehatan Provinsi PBD	Kepala Bidang P2P	1
2	Bapperinda Provinsi PBD	Kepada Bidang Ekososbud	1

2. Peserta Kota Sorong: (11 orang)

No	Instansi	Jabatan	Jumlah Peserta
1	Dinas Kesehatan Kota Sorong	Kepala Dinas Kesehatan	1
		Kepala Bidang P2P	1
2	Bappeda Kota Sorong	Bidang Sosbud dan SDM	1
3	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Kepala (UKPBJ)	1
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua TAPD Kota Sorong	1
5	Inspektorat	Inspektur Kota Sorong	1
6	Dinas Sosial Kota Sorong	Kepala Dinas Sosial	1
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong	Kepala Dinas / Kabid Pemberdayaan Masyarakat	1
8	Dinas PERUMAHAN	Kepala Dinas	1
9	Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi	Kepala Disnakertrans	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Kepada Dinas / Kabid yang membidangi	1

3. Peserta Kabupaten Sorong: (11 orang)

No	Instansi	Jabatan	Jumlah Peserta
1	Dinas Kesehatan Kab.Sorong	Kepala Dinas Kesehatan	1
		Kepala Bidang P2P	1
2	Bapperinda Kab. Sorong	Bidang Sosbud dan SDM	1
3	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Kepala (UKPBJ)	1
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua TAPD Kabupaten Sorong	1
5	Inspektorat	Inspektur Kkabupaten Sorong	1
6	Dinas Sosial Kab. Sorong	Kepala Dinas Sosial	1
7	Dinas PMK Kab. Sorong	Kepala Dinas / Kabid Pemberdayaan Masyarakat	1
8	Dinas PERUMAHAN	Kepala Dinas	1
9	Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi	Kepala Disnakertrans	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Kepada Dinas / Kabid yang membidangi	1

4. Peserta Kabupaten Raja Ampat : (11 orang)

No	Instansi	Jabatan	Jumlah Peserta
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat	Kepala Dinas Kesehatan	1
		Kepala Bidang P2P	1
2	Bappeda Kab. Raja Ampat	Bidang Sosbud dan SDM	1
3	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Kepala (UKPBJ)	1
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua TAPD Kabupaten Raja Ampat	1
5	Inspektorat	Inspektur Kabupaten Raja Ampat	1
6	Dinas Sosial Kab. Raja Ampat	Kepala Dinas Sosial	1
7	Dinas PMK Kab. Raja Ampat	Kepala Dinas / Kabid Pemberdayaan Masyarakat	1
8	Dinas PERUMAHAN	Kepala Dinas	1
9	Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi	Kepala Disnakertrans	1
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Kepada Dinas / Kabid yang membidangi	1

Catatan: Dimohon agar peserta yang akan hadir untuk memenuhi kebutuhan sbb:

1. Membawa Surat Perintah Tugas (SPT) tanda tangan asli sebanyak 1 (satu) lembar.
(tidak menerima SPT susulan)
2. Peserta luar kota wajib menyerahkan tiket kapal, jika menggunakan transport darat wajib menyertakan fotocopy SIM dan STNK sopir (yang masih berlaku) Kwitansi resmi dan Foto mobil, pada saat registrasi.
3. Adapun pembiayaan perjalanan dinas dan akomodasi didukung oleh GF ATMR melalui Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) Provinsi Papua Barat Daya dan akan dibayarkan via Transfer.

TERM OF REFERENCE (TOR)
Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan
Program ATM melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social
Contracting Tingkat Kabupaten/Kota
(BL3238)

I. PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Indonesia merupakan salah satu negara penerima dukungan hibah dari Global Fund sejak tahun 2003 dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM). Dukungan ini berkontribusi signifikan terhadap perluasan akses layanan serta penguatan sistem kesehatan melalui pendekatan *Resilient and Sustainable Systems for Health* (RSSH).

Dalam periode pendanaan 2024–2026, Global Fund menekankan pentingnya penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi, termasuk dalam aspek perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi (Monev). Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Petunjuk Teknis Integrasi (PTI) ATM sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program ATM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Namun demikian, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan keterbatasan dalam ketersediaan dan akses data realisasi belanja program ATM di daerah, sehingga belum dapat memberikan gambaran utuh mengenai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. Di sisi lain, jangkauan layanan pemerintah daerah dalam menjangkau populasi kunci dan kelompok rentan juga masih terbatas. Padahal, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas memiliki peran strategis dalam menjangkau kelompok tersebut, namun pelibatannya dalam sistem pembiayaan daerah belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembiayaan alternatif yang berkelanjutan melalui mekanisme *Social Contracting* (SC), yaitu kemitraan antara pemerintah daerah dan OMS dalam pelaksanaan program berbasis komunitas yang didukung oleh pembiayaan daerah melalui mekanisme swakelola Tipe III dan IV.

Berdasarkan hasil pemetaan program RSSH ADINKES, terdapat sejumlah kabupaten/kota yang berpotensi mengimplementasikan *Social Contracting*, namun belum didukung advokasi yang memadai. Penentuan lokus dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah (APBD), alokasi anggaran program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) pada perangkat daerah, serta peluang kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) atau komunitas.

Selain itu, pemilihan lokus juga mempertimbangkan hasil monitoring dan evaluasi, khususnya pada daerah yang masih memiliki keterbatasan akses data realisasi anggaran, sehingga belum dapat menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. Di sisi lain, jangkauan layanan program dalam menjangkau populasi kunci dan kelompok rentan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan sekaligus peluang untuk mengembangkan mekanisme *Social Contracting* sebagai strategi pembiayaan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tingkat daerah.

Oleh karena itu, diperlukan forum terintegrasi untuk monitoring dan evaluasi

belanja program ATM serta mendorong implementasi *Social Contracting*. Kegiatan ini dikemas dalam lokakarya yang menghubungkan hasil Monev dengan kebijakan dan tindak lanjut program di daerah.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota, yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan/atau Dinas/Badan Daerah lainnya, dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mencapai target Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (PP ATM), dengan melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) melalui pola Swakelola Tipe 3 dan 4 (*Social Contracting*).

2. Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten/kota terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui empat tipe Swakelola.
- b. Mendorong OPD di tingkat kabupaten/kota untuk melaksanakan APBD melalui Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4, dengan pilihan alternatif sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4 menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sedang berjalan;
 - 2) Melaksanakan Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4 melalui DPA pada APBD Perubahan; dan/atau
 - 3) Menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4 pada APBD Tahun 2027.
- c. Mendorong setiap OPD untuk dapat mengimplementasikan minimal satu atau lebih alternatif pelaksanaan sesuai dengan kesiapan dan kondisi daerah.

C. OUTPUT

1. Meningkatnya jumlah OPD di tingkat kabupaten/kota yang memahami pelaksanaan APBD melalui empat tipe Swakelola.
2. Tersusunnya rencana pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4 oleh OPD sesuai dengan alternatif yang dipilih.
3. Tersusunnya dokumen pendukung pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4, baik untuk DPA berjalan, APBD Perubahan, maupun persiapan APBD Tahun 2027.
4. Terlaksananya implementasi Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4 oleh OPD pada minimal satu alternatif pelaksanaan.
5. Meningkatnya keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pelaksanaan program PP ATM melalui skema *Social Contracting*.

D. STRATEGI

1. Penguatan kapasitas OPD melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan serta mekanisme pelaksanaan APBD dengan empat tipe Swakelola.

2. Pendampingan teknis kepada OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan/atau Tipe 4, termasuk identifikasi kegiatan yang dapat dikerjasamakan dengan OMS dan Pokmas.
3. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti DPA, kerangka acuan kerja, dan dokumen pendukung lainnya untuk implementasi Swakelola.
4. Penguatan kolaborasi lintas sektor, dengan melibatkan OPD terkait, OMS, dan Pokmas dalam perencanaan dan pelaksanaan program PP ATM.
5. Advokasi kebijakan dan penganggaran daerah, untuk mendorong dukungan regulasi dan alokasi APBD yang berpihak pada pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan 4.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan, guna memastikan implementasi berjalan sesuai rencana serta mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan.
7. Replikasi dan diseminasi praktik baik, untuk mendorong adopsi Social Contracting di lebih banyak kabupaten/kota.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) hari di Kota Sorong. Direncanakan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Oktober 2026 (jadwal tentative terlampir)

Waktu : Pukul 08.00- selesai

Tempat : Royal Mamberamo Hotel

III. PESERTA

Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program ATM melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota, yaitu:

Total Peserta pada Pertemuan : 46 Orang

Adinkes Pusat : 1 Orang

No	INSTANSI	Jumlah Orang
1	Adinkes Pusat	1

Tim RSSH Provinsi : 3 Orang

No	INSTANSI	Jumlah Orang
1	Program Coordinator	1
2	AFA	1
3	Program Coordinator Akselerator	1

Peserta Provinsi : 2 Orang

No	Instansi	Jabatan	Jumlah Orang
1	Dinas Kesehatan Provinsi	Kepala Bidang P2P	1
2	Bapperinda Provinsi	Kabid. Ekososbud	1

Peserta Kota Sorong : 11 Orang

No	Instansi	Jabatan	Jumlah Orang
1	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	1 Orang
2		Kepala Bidang P2P	1 Orang
3	Bappeda Kota Sorong	Kepala Bidang PPM	1 Orang
4	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Kepala (UKPBJ)	1 Orang
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Kepada Dinas / Kabid yang membidangi	1 Orang
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1 Orang
7	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	1 Orang
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Sorong	Kepala Dinas / Kabid Pemberdayaan Masyarakat	1 orang
9	Dinas PUPR	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1 orang
10	Inspektorat	Kepala Inspektorat	1 orang
11	Dinas Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	1 orang

Peserta Kabupaten Sorong : 11 Orang

No	Instansi	Jabatan	Jumlah Orang
1	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	1 Orang
2		Kepala Bidang P2P	1 Orang
3	Bapperinda Kab. Sorong	Kepala Bidang PPM	1 Orang
4	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Kepala (UKPBJ)	1 Orang
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Kepada Dinas / Kabid yang membidangi	1 Orang
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1 Orang
7	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	1 Orang
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)	Kepala Dinas / Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1 orang
9	Dinas PUPR	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1 orang

10	Inspektorat	Kepala Inspektorat	1 orang
11	Dinas Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	1 orang

Peserta Kabupaten Raja Ampat : 11 Orang

No	Instansi	Jabatan	Jumlah Orang
1	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	1 Orang
2		Kepala Bidang P2P	1 Orang
3	Bappeda Kab. Raja Ampat	Kepala Bidang PPM	1 Orang
4	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Kepala (UKPBJ)	1 Orang
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)	Kepada Dinas / Kabid yang membidangi	1 Orang
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1 Orang
7	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial	1 Orang
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK)	Kepala Dinas / Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1 orang
9	Dinas PUPR	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1 orang
10	Inspektorat	Kepala Inspektorat	1 orang
11	Dinas Ketenagakerjaan	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	1 orang

Panitia Lokal : 2 orang

No	Posisi	Jumlah Orang
1	Panitia Lokal	2

Narasumber : 5 orang

No	INSTANSI	Jumlah Orang
1	Kepala Bappeda Provinsi	1
2	Kepala Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BAKD Provinsi	1
3	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Provinsi	1
4	Kepala Inspektorat Provinsi	1
5	Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya	1

IV. METODE

Metode Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan

Pembiayaan Program ATM melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota adalah:

1. *Policy Dialogue*
2. Penyampaian Materi
3. Diskusi Interaktif
4. Diskusi Kelompok (Identifikasi Peluang Social Contracting)
5. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL)
6. Kesepakatan Bersama

V. SUMBER DANA

Pelaksanaan Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program ATM melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota bersumber dari Global Fund (BL 3238) RSSH tahun 2026.

Program Coordinator
Provinsi Papua Barat Daya




Aboul Kadir, SKM,M.Kes

I. **LAMPIRAN**

Rundown Pertemuan Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program ATM melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten /Kota.

WAKTU (WIB)		MATERI/DISKRIPSI	NARASUMBER/PIC
08.00 - 09.00	60'	Kedatangan dan Registrasi Peserta	Tim RSSH Provinsi
09.00 - 09.30	30'	Pembukaan	Kepala Bapperinda Provinsi Papua Barat Daya
09.30 - 10.15	45'	Paparan RSSH tentang Profil Pelaksanaan Swakelola Tipe 3 dan Tipe 4 serta variasinya yang telah dilaksanakan pada Ka/Ko tertentu.	Tim RSSH Pusat
10.15 - 11.00	45'	Optimalisasi Pembiayaan Daerah untuk Social Contracting melalui APBD Tahun Berjalan, APBD Perubahan, dan APBD Tahun 2027.	Ketua TAPD Provinsi Papua Barat Daya
11.00 - 12.00	60'	Penguatan Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan ATM Melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting di Papua Barat Daya	Kepala Bapperinda Provinsi Papua Barat Daya
12.00 - 13.00	60'	ISHOMA	
13.00 - 13.45	45'	Pemetaan Peluang Social Contracting pada Program dan Kegiatan OPD Pendukung Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) dan tanya jawab.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
13.45 - 14.30	45'	Implementasi Swakelola Tipe III dan IV: Persyaratan, Tahapan, dan Dokumen Pelaksanaan pada Pemerintah Daerah	Kepala UKPBJ Provinsi Papua barat Daya
14.30 - 15.15	45'	Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Social Contracting Program ATM	Inspektur Provinsi Papua Barat Daya
15.15 -16.30	45'	• Diskusi Kab/kota • RTL • Penutupan	Tim RSSH Provinsi